

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E- RETRIBUSI PASAR TRADISIONAL DI PASAR PATRANG KABUPATEN JEMBER

Novalius Nanda Pramana,1610511040¹Putri Robiatul Adawiyah, S.Sos, M.Si²

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Prodi Ilmu Pemerintahan

ABSTRAK

Implementasi kebijakan E-Retribusi pasar tradisiononal di Pasar Patrang Kabupaten Jember di manfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Jember yang kali ini adalah dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten jember menerapkan pembayaran retribusi pasar secara non tunai (e-retribusi) untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta transparansi juga akuntabel di pasar tradisional. Mengingat kebijakan ini adalah satu kebijakan baru dan belum ada pembahasan ilmiah mengenai penerimaan teknologi e- retribusi pasar, maka artikel ini menjadi sangat menarik untuk di bahas. Pada penelitian ini data yang di peroleh adalah data kualitatif yang menggambarkan fenomena social tetentu. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan e- retibusi pasar tradisional di kabupaten Jember di lakukan dengan menggunakan Metode George C, Edward III, yang merujuk pada faktor faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan yaitu, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur birokrasi yang menunjukan hasil yang positif meskipun masih ada beberapa kendala yang menjadi catatan perbaikan implementasi kebijakan

Kata Kunci : Implementasi E-Retribusi, Teknologi,Non Tunai,Metode George C. Edward III

ABSTRACT

The implementation of the traditional market e-retribution policy at the Jember Regency Patrang Market is utilized by the government of the Jember Regency, this time the industry and trade department of the Jember district applies non-cash market levy payments (e-retribution) to improve service quality and also accountable transparency in the market traditional. Considering this policy is a new policy and there is no scientific discussion regarding the acceptance of market levies, this article is very interesting to discuss. In this study the data obtained are qualitative data that describe certain social phenomena. The method used in this research is descriptive qualitative analysis. The results of this study indicate that the implementation of traditional market retribution policies in Jember is carried out using the George C, Edward III Method, which refers to the factors that influence the process of policy implementation, namely, Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure aimed at Positive results although there are still some obstacles that should be noted in the improvement of policy implementation

Keywords: Implementation of E-Retribution, Technology, Non-Cash, George C. Edward III Method

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini semakin memudahkan pekerjaan manusia, sebagai contoh sederhana saat ini sudah tersedia sistem

antrian berbasis website atau Aplikasi di berbagai sektor pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan surat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Penyelenggaraan pelayan publik yang prima,

sehingga dapat memudahkan rakyat untuk memperoleh pelayanan yang baik.

E-government, adalah salah satu bentuk peningkatan pelayanan pemerintah terhadap pelayanan di masyarakat. *E-government* merupakan penggunaan internet sebagai media untuk pelayanan agar pelayanan semakin cepat dan maksimal serta efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Melalui pelayanan ini pemerintah dapat meningkatkan interaksi bisnis, memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memberikan kebebasan akses informasi bagi individu (Khansari, et al 2016).

Smart City merupakan sebuah konsep tentang tata kelola kota yang cerdas yang dapat memudahkan masyarakat dalam terkait dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat. *Smart City* merupakan sebuah konsep tentang tata kelola kota yang cerdas yang dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi serta pelayanan secara cepat, *Smart City* tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga tuntutan lokal, akan tetapi juga menjawab tantangan baru bagi perkembangan pelayanan publik melalui *E-Government* seperti integrasi pelayanan masyarakat dan juga transformasi kota.

Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten yang menggiatkan gerakan *Smart City* hal ini telah di buktikan dengan proses pelayanan publik berupa informasi terpadu yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Informasi terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini sudah bisa di akses melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jember, kini pemerintah kabupaten jember mulai berinovasi pada sektor pendapatan daerah melalui retribusi, berdasarkan berita yang telah di muat oleh Radio Republik Indonesia (RRI) media di tahun 2017 telah di luncurkan *E-Retribusi* yang merupakan salah satu upaya implementasi *Smart City*. Dengan adanya *E-Retribusi* ini Pemerintah Kabupaten berharap agar dapat meningkatkan efektifitas dari pembayaran retribusi daerah, mengurangi angka korupsi yang marak di

kalangan oknum pemerintahan.

Kebijakan *E-Retribusi* yang dinilai lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan kebijakan *E retribusi* di pasar tradisional tentu saja memiliki banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Pasar Patrang merupakan salah satu pasar yang di tunjuk sebagai pasar yang melaksanakan kebijakan penarikan retribusi menggunakan kartu elektronik (*E-Money*). Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting mengingat juga menyangkut pada siklus kebijakan yang mendapat perhatian lebih dari aktor-aktor publik, oleh sebab itu penulis ingin melakukan riset lebih dalam mengenai kebijakan *E-Retribusi* tersebut dengan judul “**Implementasi Kebijakan E-Retribusi Pasar Tradisional di Pasar Patrang Kabupaten Jember**”.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, berikut merupakan rumusan masalah mengenai bagaimana proses implementasi kebijakan *E- Retribusi* Pasar Tradisional di Pasar Patrang Kabupaten Jember ?

1.2 Tujuan

Mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan *E- Retribusi* Pasar Tradisional di Pasar Patrang Kabupaten Jember faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan proses implementasi kebijakan *e- retribusi*.

1.3 Manfaat

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yaitu menambah pengetahuan terkait dengan kebijakan pemerintah, serta diharapkan dapat menambah masukan dari saran-saran untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan *e- retribusi* di pasar yang lain di kabupaten Jember

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan suatu proses yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah secara logis. Pada penelitian Skirpsi kali ini dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang berdasarkan pada fakta fakta yang nyata, sistematis, faktual dan akurat.

3.1 Jenis Penelitian

Pada Penelitian kali ini akan membahas mengenai proses imlementasi kebijakan E- Retribusi Pasar Tradisional di Pasar Patrang Kabupaten Jember beserta faktor -faktor yang mempengaruhi pelaksanaan proses implementasi kebijakan e- retribusi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan Penelitian ini dijadwalkan pada :

a. Waktu

Tanggal : 27 Januari – 14
Maret 2020

b. Tempat Pelaksanaan

Nama Instansi : UPT Pasar Patrang
Kabupaten Jember.

Alamat : Jl. Bondowoso –
Jember No. 5
Krajan, Patrang,
Kec. Patrang,
Kabupaten Jember,
Jawa Timur 68111

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

- a. Daftar Pedagang yang menjadi sasaran e-retribusi di pasar patrang kabupaten jember.
- b. Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, analisis, dan dokumentasi kondisi nyata di lapangan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan terhadap permasalahan yang ingin diteliti. Didalam wawancara terdapat suatu proses interaksi dan komunikasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (tidak terstruktur). Dalam wawancara terbuka informan bisa secara bebas menyampaikan pendapatnya tentang suatu gejala sosial tertentu. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai persepsi, pendapat,

kepercayaan, dan sikap dari para informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini merupakan petugas dari bidang retribusi pasar terkait dengan proses pengambilan iuran retribusi daerah dalam rangka penerapan kebijakan E- Retribusi di Kabupaten Jember.

2. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini (1992:74), “Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian”. Dengan kata lain merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan melibatkan diri secara langsung dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh informan. Dalam hal ini pengamatan terhadap perilaku pengambilan retribusi serta perilaku masyarakat sebagai pedagang pasar yang merupakan sasaran retribusi.

3. Dokumentasi

Menurut Hamidi (2004: 72), metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting dari

lembaga atau organisasi maupun dari individu. Dokumentasi penelitian ini adalah para peneliti mengambil gambar untuk memperkuat hasil penelitian.

3.5 Metode Penentuan informan

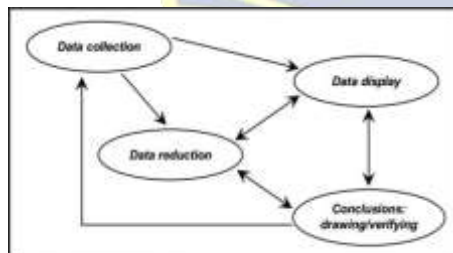
Menurut Sugiyono (2012:208) dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling.

- a. Purposive sampling: Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu, misalnya dengan pertimbangan memilih orang yang dianggap paling tahu (representatif) tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi obyek sosial yang diteliti.
- b. Snowball sampling: Teknik ini dilakukan dengan cara tanpa menentukan berapa jumlah sumber data yang akan diambil. Disini peneliti akan berhenti mencari data atau informasi dari subyek yang akan diteliti jika data tersebut dianggap cukup. Dalam penelitian ini

menggunakan teknik snowball sampling. Penentuan sampel snow ball (Kuncoro, 2003: 120) teknik pengambilan sampel ini pada mulanya berjumlah kecil makin lama semakin banyak serta berhenti mencari informasi jika dinilai telah cukup.

3.6 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Moleong (2004:280-281), “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), adalah sebagai berikut: Siklus analisis interaktif ditunjukkan dalam bentuk skema berikut ini.



(Miles dan Huberman, 1992)

Gambar 3.1 Komponen-komponen

Analisis Data Model Interaktif

1. Pengumpulan data, Itu berarti mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dianggap tepat dan menentukan fokus dan pendalaman data dalam proses pengumpulan data berikutnya
2. Reduksi data, Pengurangan data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, abstrak, transformasi langsung bidang data murni dan berlanjut
3. Penyajian data, yaitu Serangkaian organisasi informasi yang memungkinkan untuk melakukan penelitian Penyajian data yang diperoleh melalui berbagai jenis, jaringan, hubungan tindakan, atau tabel.
4. Menggambar kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus memahami dan menanggapi sesuatu yang sedang diselidiki langsung di lapangan dengan menyusun pedoman bentuk dan sebab dan akibat.

3.7 Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti

dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Triangulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Teknik pemeriksaan validitas data menggunakan apa pun selain data untuk tujuan pengecekan data atau sebagai perbandingan data. Validitas adalah, menurut Sugiyono (2006: 267), "tingkat penentuan antara data yang terjadi dalam objek penelitian dengan kekuatan yang dapat dilaporkan oleh peneliti." Menurut Hamidi (2004: 82-83), ada sejumlah teknik, yaitu:

1. Triangulasi antara sumber data, alat pengumpulan data dan pengumpulan data dalam kasus terakhir, peneliti dapat mencoba untuk mendapatkan kolega atau pembantu untuk mengekstraksi data dari penduduk di tempat-tempat yang mungkin baik setelah dasar pemikiran juga diberikan
2. Memeriksa konsistensi informasi kepada informan yang telah ditulis peneliti dalam laporan penelitian (anggota cek)
3. Akan membahas dan seminar tema kolega di departemen pembelajaran studi (peer debriefing), termasuk koreksi di sana di bawah pengawas
4. Akan membahas dan seminar tema kolega di departemen pembelajaran studi (peer debriefing), termasuk koreksi di sana di bawah pengawas.

5. Perpanjangan waktu untuk melakukan pekerjaan. Metode ini tidak hanya akan digunakan untuk mendapatkan bukti yang lebih rinci tetapi juga untuk memeriksa konsistensi tindakan informan. Bentuk triangulasi memiliki tiga jenis pertama, triangulasi sumber datayang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan dokumen serta arsip yang memuat catatan berkaitan dengan data yang dimaksud. Kedua, triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen. Ketiga, triangulasi waktu pengumpulan data merupakan kapan dilaksanakannya triangulasi atau metode pengumpulan data.

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, pertama triangulasi sumber data yang berupa observasi serta wawancara dengan narasumber secara langsung dan dokumen yang berisi catatan terkait dengan data yang ingin diperoleh peneliti.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

1 Komunikasi

Komunikasi menjadi suatu hal yang sangat penting dalam implementasi kebijakan baik itu antara implementor dengan kelompok sasaran. Setiap

implementasi kebijakan akan berjalan efektif jika terdapat koordinasi yang baik dari masing-masing aktor kebijakan. Impelementor yang terlibat dalam implementasi kebijakan E-Retribusi Pasar Tradisional di Pasar Patrang Kabupaten Jember ini adalah Pemerintah, Bank BTN dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.

Komunikasi yang terjalin antar aktor dalam mekanisme pelaksanaan kebijakan implementasi e- retribusi pasar tradisional kabupaten jember berjalan cukup baik, ini dibuktikan dengan proses implementasi kebijakan pada pasar patrang berjalan sesuai dengan harapan pemerintah juga didukung dengan sikap proaktif dari petugas juru tagih juga bank yang bekerja dengan menjemput bola, hal ini membuat pedagang merasa sangat terbantu karena tidak perlu datang ke bank untuk melakukan penambahan saldo dari kartu e- Retribusi pasar melainkan cukup dengan menunggu petugas bank datang di hari yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan data dari wawancara beberapa responden, meskipun telah menerima kebijakan e-retribusi, dan berjalan namun mereka merasa sedikit keberatan apabila sistem pembayarannya diakumulasi. Akan tetapi banyak juga yang lebih nyaman karena pembayaran jelas, dan tidak rawan pungutan liar.

4.2.2 Sumber Daya

Salah satu sumber daya yang mempengaruhi keberhasilan terhadap suatu implementasi yakni sumber daya manusia. SDM ini dituntut untuk memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya sehingga tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Pada Unit Pelaksana Teknis Pasar Patrang ini memiliki jumlah SDM sebagai berikut ini:

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	PNS	3
2.	S1	-
3.	D3	-
4.	SMA	3
5.	SMP	-
	Jumlah	6

Sumber data : Unit Pelaksana Teknis Pasar Patrang

Berdasarkan pada tabel diatas bahwasanya petugas Pada Unit Pelaksana Teknis Pasar Patrang terbilang cukup memadai. Sumber daya manusia tersebut mengetahui tentang tugas dan fungsinya sehingga bisa melakukan sebagaimana mestinya. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawainya juga dilaksanakan pelatihan seperti Bimtek (bimbingan teknis). Berikut wawancara dengan salah satu staf unit pelaksana teknis Pasar Patrang.

“Kalau untuk SDM sendiri sudah cukup memadai dari segi kualitas. Kalau untuk peralatannya sendiri cukup, laptop ada untuk menginput data dan mengelola laporan retribusi.”
(Wawancara 29 Januari 2020)

Berdasarkan dari wawancara diatas bahwa untuk SDM di bagian pengelolaan dan retribusi sudah mencukupi, dan dari segi pengetahuan, peralatan juga sudah mencukupi.

Selain Sumber Daya Manusia yang menjadi faktor penentu dalam keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah pelaksanaan kebijakan, sumber daya anggaran juga menjadi faktor penentunya. Apabila sumber daya anggaran terbatas maka kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga menjadi terhambat. Selain dilihat dari sumber daya manusia dan sumber daya anggaran, faktor selanjutnya yakni sumber daya peralatan. Sumber daya peralatan ini juga menunjang terhadap pelaksanaan dari suatu kebijakan.

4.2.3 Disposisi

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sikap

pelaksana dalam implementasi kebijakan e-retribusi pasar di pasar patrang dapat dikatakan sudah cukup baik. Sikap pelaksana yang mendukung adanya kebijakan e-retribusi pasar ini terlihat mulai dari proses sosialisasi kebijakan, yaitu penyampaian maksud dan tujuan kebijakan e-retribusi secara terperinci, bahkan penjelasannya berlanjut secara terus-menerus saat kebijakan telah diresmikan.

Kecenderungan dari pelaksana kebijakan atau respon petugas apabila ada keluhan dari Pedagang Pasar yakni dengan memberikan keterangan atau penjelasan sebagaimana mestinya yang berkaitan dengan jenis keluhannya. Disposisi sendiri bisa diartikan sebagai suatu bentuk komitmen dari pelaksana atau implementor dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Jika dilihat dari petugas Pengumpul retribusi secara manual maka pedagang merasa lebih di mudahkan dari pada melakukan tap kartu sendiri. Dengan demikian untuk saat ini penarikan kembali pada metode manual.

4.2.4 Struktur Birokrasi

Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operator yang standar (*Standard Operating Procedure* atau SOP). Dalam implementasi kebijakan e-retribusi pasar di pasar patrang ini sudah ada SOP yang

menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan tugas mereka terkait kebijakan e- retribusi pasar. Adanya SOP ini tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan e-retribusi pasar. Hal ini dikarenakan mereka yang terlibat dalam kebijakan e-retribusi pasar sudah memahami apa yang menjadi tugas mereka

Apabila dilihat dari struktur organisasi, Disperindag Kabupaten Jember telah memiliki SOP yang mana menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain itu juga struktur birokrasi atau pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pelaksanaan E-Retribusi adalah wewenang dan tanggung jawab dari pengelolaan pasar

Faktor penghambat dan pendukung Implementasi Kebijakan E-Retribusi Pasar Tradisional di Kabupaten Jember

Adapun yang menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan E-Retribusi sendiri meliputi :

- a. Mesin Tap E-Retribusi yang hanya satu dalam satu pasar.jumlah mesin Tap hanya satu dan pedagang pasar sangat banyak maka untuk melakukan Tap Kartu dirasa kurang maksimal. Posisi mesin tap kartu yang jauh dari kios pedagang sering menjadi alasan untuk tidak

melakukan tap kartu secara rutin setiap hari, bahkan ada yang terkadang dua sampai 3 hari.

- b. Kondisi Mesin yang terkadang mengalami gangguan, menghambat proses E- Retribusi pasar tradisional yang menggunakan Tap Kartu.di karena kan daya Listrik kurang tinggi dan salah satu faktor penghambat nya proses pembayaran.
- c. Ketidak sesuaian nominal laporan dari UPT dengan pihak Bank Mitra. Pada beberapa kasus terjadi ketidak sesuaian antara jumlah retribusi yang masuk kepada Bank Mitra (BTN) ke Rekening milik Pemerintah Kabupaten (Bank Jatim) di karenakan masalahnya nominal dari pihak Unit Pelaksana Teknis dengan buku Percatatan tidak sinkron
- d. Kurangnya minat pedagang untuk melakukan Tap Kartu secara mandiri dengan berbagai alasan.Sebagian pedagang takut kartu ATM hilang dan harus melakukan pengurusan lagi ke bank.
- e. Beberapa oknum pedagang bersifat tidak koorperatif, sehingga melakukan penunggakan dengan alasan karena libur atau sedang

tidak berjualan maka tidak membayar tagihan yang seharusnya di bayarkan sebagai kewajiban retribusi daerah.

Adapun faktor pendukung dari pelaksanaan kebijakan E-Retribusi Pasar meliputi :

- a. Petugas UPT membantu secara kolektif Proses Tap Kartu, sebagai upaya pelayanan dan mencapai target serta tujuan implmentasi E-retribusi dengan baik dan diharapkan oleh Pemerintah Daerah, selain itu juga memberikan kemudahan kepada pedagang yang merasa kesulitan dan tidak memahami membayar menggunakan kartu pada mesin ATM.
- b. Pihak Bank Mitra melakukan jemput bola bagi pedagang yang ingin melakukan Top Up. Untuk berjalannya Top Up maka dari pihak Bank Mitra, maka dalam satu minggu sekali keliling pasar bagi pedagang yang ingin melakukan top up.
- c. Pihak Pemerintah Daerah (DISPERINDAG) melakukan Pelatihan kepada implementor dengan tujuan peningkatan Sumberdaya Manusia di lingkungan kerja Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jember.

Dengan adanya peningkatan kualitas tersebut harapan dari pemerintah daerah adalah peningkatan pengetahuan baik dari implementor maupun sasaran implementasi kebijakan (pedagang) terkait dengan kewajiban yang harus dibayarkan dengan menggunakan cara baru yakni menggunakan E- Money atau ATM.

d. Proses Penanganan Kerusakan dilakukan secara cepat ketika ada laporan keluhan dari pihak unit pelaksana pasar. Ini salah satu faktor pendukung untuk memberikan pelayan untuk pedagang agar dapat selalu rutin melakukan pembayaran Retribusi menggunakan mesing Tapping yang telah tersedia.

IV. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan juga mengkaji beberapa literatur yang sesuai dengan penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Komunikasi, bahwa tidak semua pedagang menerima kebijakan e-retribusi menggunakan uang elektronik, akan tetapi dengan adanya kemudahan yang terus di tingkatkan oleh pihak bank juga petugas pelaksana teknis pasar pedagang merasa sedikit terbantu, transparansi pemerintahan juga dapat dirasakan karena tidak ada lagi pungutan liar yang dulu sering terjadi, kebijakan ini disambut baik meskipun masih ada yang keberatan karena berasumsi bahwa jika tutup atau tidak berdagang maka tidak perlu membayar retribusi, hal ini lah menjadi dasar pertimbangan untuk proses sosialisasi yang lebih mengenai kebijakan retribusi yang merupakan kewajiban sebagai pedagang.
- b. Sumberdaya, Sumber Daya Manusia telah memadai, dari segi kuantitas juga kualitas dari unit pelaksana teknis pasar patrang kabupaten jember selaku pelaksana kebijakan e- retribusi pasar tradisional dalam rangka pelaksanaan retribusi pasar tradisional. Sumberdaya Pendukung seperti mesin tap, unit komputer juga telah cukup memadai dalam kegiatan pelaporan maupun kegiatan E- Retribusi menggunakan mesin Tap Kartu, hanya kurang besarnya daya listrik menyebabkan dua perangkat ini tidak dapat digunakan secara bersamaan.
- c. Disposisi, komitmen dari stakeholder terkait sudah berjalan meskipun pelaksanaannya belum maksimal. Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember telah melakukan upaya peningkatan transparansi kegiatan retribusi, juga menghindari praktik pungutan liar yang tentu akan merugikan pedagang juga pemerintah. Pihak bank juga memberikan kemudahan dalam proses pelaksanaan kebijakan ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
- d. Struktur Birokrasi, untuk SOP sendiri mengikuti dari Dinas Perindustrian dan perdagangan dikarenakan semua kebijakan bersumber dari Pemerintah Kabupaten Kepada Unit Pasar selalu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- e. Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran pedagang untuk tap kartu retribusi secara mandiri, minim pengetahuan mengenai kewajiban membayar retribusi, sehingga pedagang

beranggapan jika sedang tidak berjualan maka tidak membayar retribusi. Berkaitan dengan kendala yang dihadapi, bahwa peran dari pemerintah sendiri sebagai pembuat kebijakan hanya sebagai pembuat kebijakan dan belum ada evaluasi terkait dengan kebijakan e-retribusi tersebut.

lebih fleksibel dalam penggunaannya.

5.2 Saran

Saran perbaikan yang dapat dilakukan dengan adanya Implementasi Kebijakan E- Retribusi Pasar Tradisional di pasar Patrang Kabupaten Jember ini adalah sebagai berikut:

- a. Edukasi terhadap pedagang terkait kewajiban retribusi daerah
- b. Sistem pembayaran e-retribusi pasar menggunakan bank yang sama dengan bank yang di tunjuk sebagai mitra Pemerintah Daerah dan akan langsung masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pasar, untuk mengurangi kendala ketidak sesuaian mutasi rekening dari Pasar kepada Pemerintah Daerah.
- c. Penggantian mesin Tap yang membutuhkan daya yang besar dengan mesin EDC, sehingga

V. DAFTAR PUSTAKA

- A.Nugroho Rino, S.Kristina, Ismi D.A dkk, *Traditional Market Sellers Acceptance of Electronic Government System (Case Study of Electronic-Rertribution Application in Surakarta, Indonesia)* 2018.
- E-Government Al Gore dan Tany Blair dalam Nico Andrianto (2007: 46-47).
- Haerah Kahar,2016. *Metodologi Penelitian Sosial.Fisipol Universitas Muhammadiyah Jember.*
- H.B. Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif.* Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif.* Malang: UMM Press.
- Indrajit, R. E., 2006. *Electronic Governmet. 1 ed.* Yogyakarta: Andi.
- Kadji *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan Dan Prilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas 2015.*
- Khansari et al. *Conceptual Systemigram Model: Impact of Electronic Governance On Sustainable Development* 2016.
- Leslie A. Pal ,Joko Widodo *Kebijakan Publik* (2009:12)
- Masitoh, Eis, *Upaya Menjaga Eksistensi pasar Tradisional (studi Revitalisasi pasar piyungan Bantul), Jurnal PMI vol.xNo.2.*
- Magdalena Maria,Eko Sedyono,dan Marwatah, *Analisis Penerimaan Teknologi E- Retribusi pasar dengan pendekatan Theory of Reasaoned Action* 2018.
- Moleong, Lexy. J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mas Roro Lilik. 2009. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program, Cetakan ke IV.* Surakarta: Pustaka Citra. Hal 59
- Nograšek, J. & Vintar, M., 2014. *E-Government and Organizational. Transformation of Government:Black Box Revisited?. Government. Information Quarterly, pp. 108-118.*
- Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Radarjember.jawapos.com “Tiga Pasar Terapkan E-Retribusi” Posted 22 Mei 2019 (diakses pada 07 Oktober 2019).
- Tahir Arifin, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alvabeta.
- Utami Wahyu, *Implementasi Kebijakan E-Retribusi Pasar di Pasar Singosaren Surakarta*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 2018.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis*